

A. BUKU

- Djumhana, Muhammad. 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Guntoro, Heru. “*Tanggung Gugat Pihak Penjamin Dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi*” *Jurnal Ilmiah Progressif*. 2009, Vol. 6. No. 15 April.
- Hasan, Djuhaendah. 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Pemisahaan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jajuli, Bachtiar. 1987, *Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*, Akademika pressindo, Jakarta.
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Kartini dan G. Widjaja, 2004, Cetakan Kedua, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Majjchoen, Sri Soedewi. 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jamnian dan Jaminan Perseorangan)*, Liberty, Yogyakarta.
- S. Retnowulan dan Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Mandar Maju.
- Satrio, J. 2001, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sumardjono, Maria SW. 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KEKUATAN EKSEKUTORIAL BERDASARKAN IRAH-IRAH "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus Pengadilan Negeri No. 126/Pdt/Bth/2017/PN.Yyk)

ANDY LIE, Dr. Sutanto, S.H., M.S

Orisinal dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Terkait Dengan Tanah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.01/1996 tentang Balai Lelang.

C. Internet

<http://pusatbantuanhukum.blogspot.com/2009/04/eksekusi-hak-tanggungan-apabila-debitor.html>